

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi: melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya: Padang.
- Kansil C.S.T Christine S.T. Kansil, 2002, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Scheltens D.F, 1983. *Mens en Mensenrechten, Samson Uitgeverij Alphen aan den Rijn, Brussel.*
- Gaffar Janedri M, 2013, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Ignatius Haryanto, dkk., 2000. *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, LSSP, Jakarta.
- Jawahir Thontowi, 2002. *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*, Madyan Press, Yogyakarta.
- Leah Leavin, 1998, *Human Rights Question and Answer*, India National, Book Trust.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi Ham*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widiada Gunakarya A.S.A 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Medan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Perpustakaan STIK, Jakarta.
- Khairul Fahmi, 2021, *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Lon L. Fuller. 1964. *The Morality Of Law (Eight Ways To Fail To Make Law)*. Yale University Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 dan Pasal 35 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Terhadap Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor.

56/PUUXVII/2019. Putusan Mahkamah Konsitusi

Nomor 87/PUU-XX/2022.

C. Jurnal

Adrianus Bawamenewi, 2019, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Vol.13, No.3.

Endrawati, Netty. (2012). "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)*". Skripsi: Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum. Universitas Soedirman.

Khairul Fahmi, 2017, *Penggeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konsitusi, Volume 14, Nomor 4.

Mirza Hilmi Fahlevi, 2021, *Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1.

Muzayanah, 2021, *Kajian Yuridis Tentang Kesadaran Warga Negara Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Melaksanakan Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 7, No.1.

Natsif, Fadli. Andi., 2019, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Al-Risalah, Vol.12, No.1.

D. Website

Wahyu SK, 2018 <https://akurat.co/pembatasan-hak-dipilih-bagi-mantan-terpidana-korupsi-dalamperspektif-hukum-dan-ham>

Syafaruddini idris, 2019

[Http://Syafarafuddinidris.blogspot.com/pengertian-pemilu-asas-asas-syarat](http://Syafarafuddinidris.blogspot.com/pengertian-pemilu-asas-asas-syarat).

Moh Dani Pratama Huzaini,

2019 [Http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pencabutan-Hak-Politik-Calon-PejabatPublik-diMomentum-Pemilu](http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pencabutan-Hak-Politik-Calon-PejabatPublik-diMomentum-Pemilu)

Media Indonesia, 2018

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1381-terpidana-korupsi- dilarang mencaleg, Diakses tanggal 26 Desember 2022.

ICW, 2018 <https://www.antikorupsi.org/id/siaranpers/kpu-harus-jalan-terus-larang- mantannapi-korupsi-nyaleg>, Diakses 26 Desember 2022

